



DPRD DKI Minta TGUPP Dihilangkan

◆ Digaji Puluhan Juta, Namun Tinggalkan Persoalan di Jakarta

JAKARTA (Poskota)

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP- RD) DKI Jakarta lagi-lagi menyingung Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) buatan Anies Baswedan. Pasalnya, tim yang sebenarnya disiapkan itu nyatanya malah membuat persoalan baru.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, keberadaan TGUPP harus dibubarkan bertepatan dengan masa purna Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 16 Oktober mendatang.

Pasalnya, Prasapaan akrabnya, berpandangan para staf yang membantu tugas tugas gubernur dan wakil gubernur ini justru yang meninggalkan persoalan di Jakarta. Kendati demikian, Pras tak mau menjelaskan secara rinci persoalan yang dimaksudnya. "TGUPP otomatis 16 Oktober sudah hilang. Itu lah penyakitnya DKI," katanya, Rabu (14/9).

Sebelumnya, Pras juga mengatakan, TGUPP selama ini membuat pembangunan Jakarta tidak karuan. Bahkan dinilainya cenderung mem-



Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

bebani masyarakat. "TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak merugikan," ujarnya.

Politisi PDIP ini juga mencontohkan pembangunan yang slebor yaitu, infrastruktur jalan semakin pendek karena ada penambahan atau pelebaran trotoar. "Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini sekarang pendek loh. Saya temukan di Kemang, ada tali air ditambahin trotoar, (trotoar) dilebarkan," sindir Pras.

"Ternyata tali air itu tidak nyambung den-

gan trotoarnya. Jadi buntu di tengah-tengah. Akhirnya dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangun," tambah Pras.

Seharusnya, lanjut Pras, pembangunan yang perlu dilakukan dari kawasan pinggiran Jakarta. Sehingga adanya pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di tengah perkotaan.

"Mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semuanya harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing aja kelihatan bagus tapi di

pinggir-pinggir jelek," cetus Pras.

Sebagai informasi, TGUPP Gubernur Anies saat ini berisi 74 ahli non-PNS dengan lima bidang. Lima bidang itu yakni pengelolaan pesisir Jakarta, pembangunan ekonomi dan penataan kota, harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan.

Keberadaan itu sendiri hadir dari Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP. Kepgub itu ditandatangani Anies pada 28 Desember 2017. Berdasarkan kepgub

itu, status anggota TGUPP dibagi menjadi 10 tingkatan.

Tingkatan atau kelas pertama adalah ketua TGUPP. Gaji maksimal yang diterima ketua TGUPP adalah Rp 51.570.000. Tingkatan kedua adalah jabatan ketua bidang TGUPP. Gaji yang didapatkan untuk pemegang jabatan itu adalah Rp 41.220.000.

Selain ketua TGUPP dan ketua bidang, jabatan lain yang ada dalam TGUPP adalah anggota. Namun, anggota TGUPP juga dibagi-bagi dalam beberapa grade, mulai dari grade 1 sampai grade 3c.

Anggota grade 1 menerima gaji maksimal Rp 31.770.000, anggota grade 2 mendapatkan Rp 26.550.000, anggota grade 2a Rp 24.930.000, dan anggota grade 2b Rp 20.835.000.

Untuk anggota-grade 3 mendapatkan Rp 15.300.000, anggota grade 3a maksimal menerima Rp 13.500.000, anggota grade 3b mendapatkan Rp 9.810.000, dan anggota grade 3c mendapatkan Rp 8.010.000. (Aldi/ffn)